PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN PEMANFAATAN RUANG DI KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN PROPINSI PAPUA

Law Enforcement Against Space Utilization In the Yapen Island District of Papua Province

TESIS

Untuk Memenuhi Salah satu Syarat Ujian Guna memperoleh Gelar Magister Hukum Pada Program Studi Magister Ilmu Hukum

Oleh :
ENDANG ALASTYANINGSIH
NIM : 2022025015105

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS CENDERAWASIH
JAYAPURA
2024

HALAMAN PERSETUJUAN

TESIS

PENEGAKKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN PEMANFAATAN RUANG DI KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN PROPINSI PAPUA

Law Enforcement Against Space Utilization In the Yapen Island District of Papua Province

Telah diperiksa dan disetujui untuk diseminarkan
Pada Tanggal, 19 Juni 2024

Menyetujui,

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Marthinus Solossa, SH, M.Hum	**Dr. Hotlan Samosir, SH, M.H**
NIP. 19620212 199003 1 003	**NIP. 19650610 199403 1 003**

Mengetahui,
Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum

Dr Marthinus Mambaya, SH, M.Hum
NIP 19660302 199303 1 002

PELAKSANAAN UJIAN

Tesis ini telah diuji Pada Tanggal, 19 Juni 2024

TIM PENGUJI

Ketua / Anggota	Dr. Marthinus Solossa, SH, M.Hum NIP. 19620212 199003 1 003	(.....)
Sekretaris/Anggota	Dr. Hotlan Samosir, SH, M.H NIP. 19650610 199403 1 003	(.....)
Anggota	Dr Marthinus Mambaya, SH, M.Hum NIP 19660302 199303 1 002	(.....)
Anggota	Dr. Yuliana D.W.Susi Iriyanti, SH, M.Hum NIP 19660702 199303 2 003	(.....)
Anggota	Prof. Dr. Frans Reumi. S.H, M.A, M.H NIP 19600713 198903 1 002	(.....)

PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT
PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ENDANG ALASTYANINGSIH

NIM : 2022025015105

Judul : Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Kabupaten Kepulauan Yapen

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis Tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Magister. Baik di Universitas Cendrawasih maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Dosen Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya berseia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Jayapura, 19 Juni 2024

Yang Membuat Pernyataan

ENDANG ALASTYANINGSIH
NIM. 2022025015105

ABSTRAK

Endang Alastyaningsih, (2022025015105) Tesis ini membahas tentang Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Penataan Ruang Di Kabupaten Kepulauan Yapen Propinsi Papua. (Dibimbing oleh Dr. Marthinus Solosa, SH, M.Hum. selaku Pembimbing I dan Dr. Hotlan Samosir, SH, M.H. selaku Pembimbing II). Penelitian ini bertujuan untuk : 1) Untuk mengetahui penataan ruang yang sesuai dengan peraturan yang berlaku di Kabupaten Kepulauan Yapen Propinsi Papua; 2) Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap pelanggaran terhadap penegakkan hukum penataan ruang di Kabupaten Kepulauan Yapen Propinsi Papua.

Penelitian ini menggunakan Metode Penelitian Hukum Yuridis Normatif. dimana pendekatan yang digunakan adalah :pendekatan perundang-undangan (statute approach) yang artinya bahwa penelitian ini menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan (isu hukum) yang akan diteliti dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau dan bahan sekunder. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan Konseptual (Conceptual Approach) yang artinya bahwa penelitian hukum yang dilihat dari aspek konsep-konsep hukum, asas-asas hukum nilai-nilai yang terkandung dalam ilmu hukum serta isu-isu yang ada di masyarakat. Jenis data adalah data primer dan data sekunder.

Hasil penelitian menunjukan: 1) Penataan ruang di Kabupaten Kepulauan Yapen sebagian sudah sesuai dengan Peraturan Daerah RTRW Propinsi Papua maupun Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen yang berlaku namun sebagian tidak sesuai dengan Perda yang berlaku, tetapi terlaksana karena adanya intervensi dan kebijakan Kepala Daerah yang disesuaikan dengan janji politik Kepala Daerah saat berkampanye pemilihan Kepala Daerah tetapi juga berdasarkan dari usulan masyarakat melalui forum musrenbang Kampung, Distrik, Kabupaten, maupun Propinsi. 2) Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi terhadap pelanggaran penegakan hukum , sesuai dengan teori penegakan hukum dari Soerjono Soekanto terdiri dari : hukumnya, penegak hukumnya, sarana dan prasarana, masyarakatnya dan kebudayaannya. Kelimanya belum berjalan secara maksimal karena pelanggaran lebih banyak dilakukan oleh pihak pemerintah.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Pelanggaran, Pemanfaatan Tata Ruang

ABSTRACT

Endang Alastyaningsih (2022025015105), This thesis discusses law enforcement against spatial planning violations in Yapen Island Regency, Papua Province. (Supervised by Dr. Marthinus Solosa, SH. M.Hum, as Suvervisor I and Dr Hitlan Samosir, SH. M.H as Supervisor II). This research aims to : (1) understand spatial planning in accordance with the applicable regulations in Yapen Islands Regency, Papua Province; (2) Identify the factors that influence law enforcement against spatial planning violations in Yapen Islands Regency, Papua Province.

This research uses normative juridical legal research method, where the approach used includes : a statute approach, meaning this research examines all legislation related to the legal issues to be studied by investigating literature and secondary materials. This research also uses a conceptual approach, meaning legal research viewed from the aspect of legal concepts, legal principles, values contained in legal science, and issues present in society. The types of data are primary data and secondary data.

The research results show : 1) The spatial planning as planned in Yapen Islands Regency is partially in accordance with the Regional Spatial Plan Regulations of Papua Province and the Regional Regulations of Yapen Islands Regency in effect, but partially not in accordance with the applicable Regional Regulations, yet implemented due to intervention and policies of the regional Head adjusted with the political promises during the election campaign, and also based on community proposal through the village development planning forum at the district and provincial levels. 2)The factors influencing law enforcement violations according to Soerjono Soekanto's law enforcement theory consist of the law itself, law enforcers, facilities and infrastructure, the community, and culture . All five have not been running optimally besause most violations are committed by the government.

Keywords : Law Enforcement, Spatial Planning Violations

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

" Setiap kesulitan selalu ada kemudahan. Setiap masalah pasti ada solusinya, maka jadilah cahaya dalam kegelapan"

Kupersembahkan Kepada :

1. Kedua orang tua saya yang telah mengasuh dan membimbing Penulis dan tak henti-hentinya memberikan doa dan dukungan kepada Penulis.
2. Suami Yulians Charles Gomar, SH yang telah mendukung secara finansial serta selalu memberikan doa untuk kelancaran pembuatan Tesis.
3. Kedua anak Gian Chandra Prasetheos Gomar, S.Tr.IP dan Diva Glenda Milene Gomar yang selalu memberikan doa dan dukungannya kepada Penulis.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa membalas segala kebaikan yang telah diberikan kepada Penulis. Akhir kata semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi kita semua, terutama dalam perkembangan hukum di tanah Papua.

Jayapura, 19 Juni 2024

ENDANG ALASTYANINGSIH
2022025015105

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Penulis panjatkan atas kehadirat Tuhan Yang Masa Kuasa, karena atas berkat dan anugerahnya maka Penulis dapat menyelesaikan penyusunan Tesis yang berjudul " PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN PEMANFAATAN RUANG DI KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN PROPINSI PAPUA, dapat diselesaikan dengan baik.

Penyusunan Tasis ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan Studi Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Cendrawasih, Papua.

Kami ucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada semua pihak, sehingga Penulis dapat menyelesaikan Tesis ini.

1. Dr. Oscar Oswald O. Wambrauw, S.E, M.Sc.agr, selaku Rektor Universitas Cendrawasih.
2. Prof. Dr. Frans Reumi , SH, MA, M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Cendrawasih
3. Dr. Marthinus Solosa, SH, M.Hum, selaku Pembimbing Utama yang telah meluangkan waktu dan tenaganya untuk memberikan bimbingan, bantuan, sehingga tesis ini dapat terselesaikan;
4. Dr. Hotlan Samosir, SH, M.H, selaku Pembimbing Pendamping yang telah meluangkan waktu dan tenaganya untuk memberikan bimbingan, bantuan, sehingga tesis ini dapat terselesaikan;
5. Dr. Marthinus Mambaya, SH, M.Hum, Dr. Yuliana D.W.Susi Iriyanti, Sh, M.Hum, selaku Tim Penguji yang memberikan kritik dan saran untuk menjadikan tesis penulis ini lebih baik.

6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Cendrawasih yang dengan ikhlas telah membagi ilmunya kepada penulis selama menjalani proses perkuliahan di Fakultas Hukum Cendrawasih.
7. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Bapak Rony Theo Ayorbaba, AP, M.Si yang telah memberikan dukungannya.
8. Rekan-rekan Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Cendrawasih

Semoga hasil penulisan ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi Pemerintah daerah maupun bagi masyarakat.

Jayapura, 19 Juni 2024

ENDANG ALASTYANINGSIH
2022025015105

DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL
HALAMAN PERSETUJUAN ..... **i**
PELAKSANAAN UJIAN ..... **iii**
PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT ..... **iv**
ABSTRAK ..... **v**
ABSTRACT ..... **vi**
MOTTO DAN PERSEMBAHAN ..... **vii**
KATA PENGANTAR ..... **viii**
DAFTAR ISI ..... **ix**
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 9
C. Tujuan Penelitian 9
D. Manfaat Penelitian 9
E. Metode Penelitian 10
F. Landasan Teori 13
G. Kerangka Teori 20
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
A. Konsep Negara Hukum 26
B. Penegakan Hukum 32
C. Saksi Bagi Pelanggaran Penataan Ruang 36
D. Penataan Ruang 42
E. Peraturan Daerah 46
F. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan Polisi Pamong Praja 53
G. Perencanaan Penataan Ruang 61
H. Pengendalian, Pemanfaatan dan Pengawasan Ruang 63
I. Review RTRW 65

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penataan Ruang Yang Sesuai Dengan Peraturan Yang Berlaku di Kabupaten Kepulauan Yapen Propinsi Papua 67

B. Faktor-faktor Apa Saja Yang Dapat Mempengaruhi Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Penataan Ruang di Kabupaten Kepulauan Yapen Propinsi Papua 95

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN 137

B. SARAN 138